

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan TAHUN ANGGARAN 2026



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansial adalah penerjemahan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD. Demikian pula Renja OPD mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 berpedoman kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan periode 2023 – 2026 yang memiliki tujuan “**Meningkatnya kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB**”, dan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang bertema “**Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan yang berkeadilan dan inklusif**”. Demikian pula dokumen ini tetap merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 serta isu-isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Barat periode anggaran Tahun 2026 dan tetap disinkronkan dengan RPJMN.

Dengan demikian dokumen rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja DKP Provinsi Sulawesi Barat memiliki arti yang strategis

dalam menopang penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dengan berdasar pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Renja OPD menjadi dokumen yang secara substansial merupakan implementasi dari tujuan, sasaran dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi

Barat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja menjadi acuan OPD untuk merumuskan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Renja OPD merupakan salah satu tools (media) untuk bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2026. Dokumen Renja Tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Mengacu pada nilai strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah seperti berikut:

1. Diformulasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan fokus pada RKPD tahun berjalan.
2. Program dalam Renja harus sejalan dengan program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan JDaerah pada tahun berjalan dalam hal ini adalah RPD

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 serta segala Isu-isu Strategis yang tertuang didalamnya.

3. Program dan kegiatan yang tertuang pada Renja OPD harus selaras, sinergis dan sinkron dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang dan Forum OPD serta forum lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

4. Program dan kegiatan dalam Renja disertai dengan tolak ukur yang jelas berupa indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan disupport dengan alokasi penganggaran yang proporsional atau yang memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat memformulasi dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi acuan pelaksanaan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang didalamnya memuat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan tahun lalu, tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Regulasi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun

2015;

4. Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011–2015;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2037;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Formulasi atau Perumusan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dalam jangka setahun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Renja – DKP) Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran (DPA-RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026.
2. Sebagai sarana untuk mengakomodir kebutuhan dasar pada setiap urusan bidang-bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan arah dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2026.
3. Sebagai sarana dalam melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 ini meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengurai terkait latar belakang penyusunan dan penetapan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yakni berupa pengertian, landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar penyusunan DPA-RKA serta maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini, agar tetap sinkron antara Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan RPD dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat sebagai

dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan sistematika penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Meliputi antara lain penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengurai tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penyusunan

Menjelaskan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD dan format susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun lalu dan perkiraan Tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan daerah terutama yang terkait dengan tugas pokok, fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat memiliki Tujuan **“Meningkatnya kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan ada 4 (empat) sasaran yang merupakan sasaran Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat ke depan yakni :

1. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan
2. Tersedianya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Barat
3. Tersedianya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif
4. Terwujudnya Birokrasi DKP yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima

Tolak ukur pencapaian sasaran strategis dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi barat tertuang dalam indikator kinerja utama tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per tahun di Sulawesi Barat (%)
2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di Sulawesi Barat

(%)

3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya di Sulawesi Barat (%)
4. Presentase peningkatan produksi olahan perikanan di Sulawesi Barat (%)
5. Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat

6. Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan)
7. Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan (%)
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DKP.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DKP

Adapun Evaluasi Rencana Kerja (RENJA OPD) adalah bagian dari tahapan pengukuran keberhasilan maupun ketidak tercapaian target dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada proses ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai terevaluasi sehingga Renja OPD dapat menentukan kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi demikian pula melahirkan solusi konkrit dari permasalahan tersebut.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sulawesi Barat menurut DPA tahun 2024 adalah sebesar Rp. **28.701.612.151,-** dengan Rincian Belanja Operasi Sebesar Rp. **15.432.964.381,-** dan Belanja Modal sebesar Rp. **13.268.647.770,-** Realisasi keuangan atau penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. **28.239.111.499,-** atau sebesar 98,39

% dengan rincian: realisasi belanja operasi sebesar Rp. **15.337.312.856,-** atau 99,38% dan realisasi belanja modal sebesar Rp. **12.901.798.643,-** atau sebesar 97,24%.

Sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima, maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 telah

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, 6 program dan 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 dan realisasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2024 disajikan pada ***lampiran 1***.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DKP

Dalam menjalankan tugas yang diamanatkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang masing-masing melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari 6 program dan 13 kegiatan 28 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada **tabel 2.I**, di bawah ini.

Tabel 2.I. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Nama Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		8.435.22 5.079	8.389.27 0.031
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		141.58 0.811	141.57 9.811
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	11 6.825	11 6.825

Daerah	Alat Tulis Kantor		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	21 2.410	21 2.410
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	26.40 0.000	26.40 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.19 0.000	17.19 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.66 7.000	11.66 6.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.65 7.315	1.65 7.315
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.56 6.521	1.56 6.521
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.00 0.000	48.00 0.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	90 2.740	90 2.740
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.00 0.000	6.00 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75 0.000	75 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.60 0.000	15.60 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.51 8.000	11.51 8.000
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		7.358.21 9.876	7.319.03 3.491
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji Pokok PNS	3.583.35 6.262	3.583.35 6.262
	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.70 0.750	89.70 0.750
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	316.29 5.726	316.27 6.548

	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.48 5.040	4.48 5.040
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	193.30 5.000	192.22 5.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.66 5.000	118.66 5.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.93 0.000	103.93 0.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.18 0.000	5.18 0.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	181.91 9.040	181.91 9.040
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.04 1.640	3.04 1.640
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.45 5.485	9.44 1.196
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5 4.439	4 7.367
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.626	1.434
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	227.97 7.879	219.49 9.936
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.40 6.825	3.40 6.824
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.32 4.683	7.32 4.683
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	18 4.536	18 4.536
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.97 4.071	21.97 4.070
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	55 3.584	55 3.584
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	78.51 6.443	76.55 3.537
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.38 2.490	4.38 2.490
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.059.88 3.880	2.033.01 1.833

	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	266.50 0.630	265.80 3.464
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	7.58 5.310	7.52 9.720
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.20 2.769	1.20 2.769
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39 8.268	39 8.268
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.73 8.500	1.73 8.500
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	67.20 0.000	67.20 0.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		281.36 3.728	281.20 7.779
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1 3.478	1 3.478
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.76 0.000	17.76 0.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.28 8.250	17.28 8.250
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	61 6.000	61 6.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.00 0.000	50.00 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.99 6.000	76.99 2.051
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	118.69 0.000	118.53 8.000
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		110.59 4.418	110.59 1.418
Pengadaan Kendaraan	Belanja Alat/Bahan	6	6

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.520	5.520
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8 0.000	8 0.000
	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.59 0.000	76.59 0.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.27 5.861	1.27 2.861
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	15 9.307	15 9.307
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.70 1.700	6.70 1.700
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.93 6.500	7.93 6.500
	Belanja Modal Personal Computer	17.78 5.530	17.78 5.530
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		305.81 3.403	300.17 4.609
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	39.60 0.000	39.60 0.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.25 3.040	3.47 9.760
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.31 6.960	4.35 0.240
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.20 0.000	37.20 0.000
	Belanja Tagihan Listrik	54.31 2.544	53.70 7.250
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	7.81 2.000	7.71 8.500
Penyediaan Jasa	Belanja Alat/Bahan	6	6

Peralatan dan Perlengkapan Kantor	untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.368	9.368
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21 0.496	21 0.496
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.50 0.000	1.50 0.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.00 0.000	1.00 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.00 0.000	60.00 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.40 0.000	11.20 0.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.00 0.000	10.00 0.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5 7.085	5 7.085
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.28 1.910	5.28 1.910
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.40 0.000	26.40 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.40 0.000	38.40 0.000
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		237.65 2.843	236.68 2.923
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	40 0.712	40 0.712
	Belanja Jasa Tenaga	19.20	19.20

	Keamanan	0.000	0.000
	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.20 0.000	19.20 0.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.00 0.000	18.03 0.080
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	142.56 0.000	142.56 0.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	20.24 0.000	20.24 0.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30 1.414	30 1.414
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	15 3.997	15 3.997
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.59 6.720	16.59 6.720
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		6.759.43 4.111	6.655.61 0.545
PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI		1.894.13 9.000	1.798.98 5.890
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.053.97 1.000	1.001.83 5.890
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	840.16 8.000	797.15 0.000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		4.865.29 5.111	4.856.62 4.655
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.20 5.694	2.20 5.164
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.85 3.321	2.85 3.321
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	66 6.793	66 6.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20 0.000	20 0.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.80 5.980	39.74 5.980
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	862.90 1.714	862.90 1.714
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.55 1.550	6.55 1.550
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.37 6.000	32.37 6.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.19 4.000	10.90 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.00 0.000	30.00 0.000

	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	75.00 0.000	75.00 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.97 5.000	24.97 5.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	166.50 0.000	166.50 0.000
	Belanja Sewa Peralatan Selam	22.50 0.000	22.50 0.000
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-
	Belanja Sewa Mebel	2.20 0.000	2.20 0.000
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.00 0.000	4.00 0.000
	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	4.00 0.000	4.00 0.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	20.24 0.000	20.13 0.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	1.50 0.000	1.50 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.87 5.000	45.76 5.557
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77.00 6.000	76.89 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.75 0.000	3.75 0.000
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.828.24 2.170	2.828.24 2.170
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.77 7.750	14.76 7.000
	Belanja Jasa Tenaga	60.00	56.25

	Operator Komputer	0.000	0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.86 0.000	108.86 0.000
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	30 0.144	30 0.144
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23 0.995	15 3.997
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25 0.000	25 0.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20 0.000	20 0.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.70 0.000	6.70 0.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.60 0.000	2.70 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.00 0.000	45.00 0.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-
	Belanja Sewa Peralatan Selam	37.50 0.000	37.50 0.000
	Belanja Sewa Mebel	75 0.000	75 0.000
	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	1.00 0.000	1.00 0.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak	1.50 0.000	1.50 0.000

	Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.56 4.000	33.44 1.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.26 0.000	33.25 9.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.75 0.000	3.75 0.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.25 0.000	26.25 0.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	35.00 0.000	35.00 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.82 4.000	103.68 4.665
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.43 5.000	81.45 5.893
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		9.322.94 7.200	9.101.58 1.571
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI		9.322.94 7.200	9.101.58 1.571
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.62 6.000	40.62 6.000
	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	1.050.00 0.000	1.034.90 0.050
	Belanja Modal	567.00	536.87

	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0.000	3.100
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.355.00 0.000	5.239.89 6.570
	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	819.00 0.000	779.84 0.450
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.050.00 0.000	1.045.26 1.160
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.18 0.000	5.18 0.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84 0.000	84 0.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.44 8.550	1.44 8.500
	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	40.93 1.250	40.93 1.250
	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	102.00 0.000	102.00 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.60 0.000	57.60 0.000

	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	76.80 0.000	63.85 0.000
	Belanja Tagihan Listrik	62.73 2.760	60.10 9.036
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	8.24 4.000	6.68 0.815
	Belanja Penambahan Daya	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.59 5.000	8.59 5.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.66 6.640	26.66 6.640
	Belanja Modal Peralatan Las	2.77 5.000	2.77 5.000
	Belanja Modal Alat Processing	13.32 0.000	13.32 0.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.10 0.000	11.10 0.000
	Belanja Modal Mebel	23.08 8.000	23.08 8.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	-	-
	Belanja Modal Pagar	18.88 1.100	18.88 1.100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		3.854.34 6.120	3.763.03 6.821
PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT		3.854.34 6.120	3.763.03 6.821
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	302.33 7.200	302.29 4.200

Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	51.95 6.600	51.95 6.600
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	195.00 0.000	180.00 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.20 0.000	19.20 0.000
	Belanja Tagihan Listrik	87.88 0.000	86.16 5.209
	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	45.00 0.000	45.00 0.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	200.00 0.000	199.79 3.413
	Belanja Modal Bangunan Pternakan/Perikanan	1.502.97 0.000	1.460.18 9.050
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	423.36 0.000	403.87 9.900
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.00 0.000	195.00 0.290
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	315.20 7.000	309.92 1.250
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.40 5.200	1.40 4.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.85 3.800	1.85 3.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.51 0.000	1.51 0.000

	Benda Pos		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.00 0.000	9.99 8.000
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	336.77 0.820	336.76 5.926
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	73.42 6.500	71.78 7.600
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.26 4.000	19.11 2.583
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.20 5.000	67.20 5.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		94.58 1.643	94.58 1.631
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL		94.58 1.643	94.58 1.631
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	49 6.392	49 6.383
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34 2.510	34 2.509
	Belanja Jasa Operator Kapal	21.00 0.000	21.00 0.000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	32 3.232	32 3.232
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41 9.509	41 9.507
	Belanja Jasa Operator Kapal	72.00 0.000	72.00 0.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL		216.19 6.898	216.14 9.800

PERIKANAN			
PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR		94 0.000	91 1.000
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9 6.264	9 3.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13 8.736	13 8.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70 5.000	68 0.000
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN		215.25 6.898	215.23 8.800
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Belanja Bahan-Bahan Baku	164.59 6.800	164.59 6.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.50 0.000	7.50 0.000
Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	90 6.850	90 3.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70 3.248	69 9.000
	Belanja Alat/Bahan	40	40

	untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0.000	0.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.80 0.000	1.80 0.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.00 0.000	30.00 0.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.35 0.000	9.34 0.000
Jumlah		28.701.612.1 51	28.239.111.4 99

Dari 28 sub kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 mencapai nilai rata rata sebesar (97,97 %) dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Nilai capaian kegiatan diatas 99 % sebanyak : 20 kegiatan
- Nilai capaian kegiatan 90 s/d 99 % sebanyak : 8 kegiatan
- Nilai capaian kegiatan kurang dari 90% sebanyak : 0 kegiatan

Hal ini dapat dimaknai bahwa secara umum target kinerja program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 sebagian besar tercapai/terpenuhi sesuai yang telah direncanakan.

Beberapa penjelasan terkait kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat masih pada kategori capaian kinerja belum maksimal antara lain :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Bidang Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dengan jumlah program 6 (enam) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan mengelola anggaran pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. **28.701.612.151** dengan capaian realisasi sebesar Rp. **28.239.111.499** atau 98,39 %, namun pencapaian realisasi fisik mencapai 100.

2. Disamping pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat didasari realisasi capaian anggaran, juga terdapat beberapa indikator yang diukur dalam pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah antara lain : Persentase kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB, Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per

tahun di Sulawesi Barat, Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton), Jumlah produksi Perikanan budidaya (Ton), Jumlah konsumsi ikan (Kg)Jumlah konsumsi ikan (Kg), Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau- pulau kecil di Sulawesi Barat Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan), dan Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan, dimana sebagian besar indikator utama capaiannya diatas 90 %, sementara untuk indikator Persentase kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat baru dirilis nanti di minggu pertama bulan Maret 2024. Sedangkan untuk capaian Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan), hanya mencapai 33,33 % atai 1 (satu) Kawasan yang dicapai yaitu Kawasan konservasi Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju sudah ditetapkan sebagai Kawasan konservasi oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sementara target lainnya Kabupaten Majene dan Polewali Mandar belum dicapai disamping penetapan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, juga dalam menentukan Kawasan konservasi di butuhkan kajian Kawasan konservasi yang memerlukan anggaran yang tidak sedikit sementara anggaran APBD yang sangat terbatas.

3. Sepanjang tahun anggaran 2024 target realisasi anggaran disetiap triwulan tidak dicapai, disamping karena target perencanaan anggaran kas yang terlalu tinggi, juga terdapat kegiatan belanja barang yang diserhkan ke masyarakat terkendala berkas persyaratan pencairan

untuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat yang tidak terpenuhi lebih cepat dan juga ada beberapa kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat sehingga pelaksanaan kegiatannya tidak bisa dilaksanakan dan menunggu kegiatan tersebut disesuaikan RKPD pada perubahan anggaran 2024.

Implikasi yang timbul dari pencapaian target kinerja program kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, pada **tabel 2.2 di bawah ini**.

Tabel 2.2. Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase (%)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan yang	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di	Persen	107.95	102.60	95,04

	berkesinambungan	Sulawesi Barat				
2	Tersedianya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	Kawasan	3	1	33,33
3	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Sulawesi Barat	Ton	66.297	64.653	97,52
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat	Ton	100.131	99.330	99,20
		Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat	Kg/Kapita/Tahun	68,00	66,20	97,35
4	Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, desktruktif dan	Persen	100	99,00	99,00

	profesional dan partisipatif	Pelanggaran Usaha Perikanan				
--	------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya proses pelayanan secara umum kepada semua stakeholder sesuai kemampuan yang dimiliki.
2. Terciptanya situasi dan kondisi aman dan nyaman di lingkungan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas antara mitra kerja yang terkait.
4. Teridentifikasinya kelompok-kelompok masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan pengawas kelautan dan perikanan yang masih membutuhkan bantuan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Tersedianya sarana dan prasarana serta sarana produksi dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.
6. Terasilitasinya masyarakat pembudidaya dalam mendapatkan benih udang Vannamee dari Balai Benih Ikan Pantai di Poniang Kabupaten Majene.
7. Tertatanya penerbitan dokumen perizinan usaha perikanan terutama dalam penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI.
8. Terwujudnya sistem pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan berbasis masyarakat.
9. Tersusunnya Regulasi terkait pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil (Dokumen dan Materi Teknis RZWP3K).

2.3. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Inventarisasi dan isu-isu strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tupoksi yang dilaksanakan

selengkapnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah perairan lainnya di Sulawesi Barat, dengan segala potensi dan

- permasalahannya belum optimal termanfaatkan mulai dari aspek penangkapan ikan, budidaya ikan (udang, rumput laut dan organisme perairan lainnya) maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelolanya yang masih sangat terbatas.
- b. Pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir yang belum optimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM yang belum memadai.
 - c. Kondisi ekosistem seperti ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove berada pada kisaran rusak sampai kritis di hampir semua wilayah pesisir (Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat). Kondisi ini sangat memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan upaya maksimal dan secepat mungkin dalam mengatasi masalah tersebut, sebab bila tidak, bukan saja kita kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumber daya pangan, akan tetapi ancaman akan kehilangan mata pencaharian bagi nelayan sangat memungkinkan terjadi kedepan.
 - d. Data base terkait jumlah rumah tangga perikanan yang miskin, hampir miskin, prasejahtera dan sejahtera belum tersedia sehingga ukuran akan jumlah pengentasan kemiskinan yang harus dituntaskan pada sebuah kawasan nelayan masih sangat terbatas.
 - e. Masih terbatasnya data tentang keadaan awal masyarakat (tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, keterampilan serta perilaku masyarakat) untuk mengukur tingkat kesejahteraan mereka;

- f. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal karena adanya ruang terbuka yang diberikan dalam rangka revisi DPA yang memerlukan waktu yang cukup lama;
- g. Masih tingginya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan nelayan, produktivitas nelayan masih rendah
- h. Armada, alat tangkap, dan alat bantu penangkapan ikan masih relatif bersifat tradisional dan masih sangat terbatas serta cenderung sarana

tersebut sudah mulai usang sehingga perlu ada upaya replacement dan pemutakhirannya.

- i. Umumnya masyarakat di kepulauan masih sangat terbatas dalam mengakses air bersih maupun listrik serta minimnya sarana pendukung lainnya.
- j. Masih terbatasnya upaya konservasi perairan daerah terhadap ekosistem maupun organisme perairan yang perlu dilestarikan
- k. Upaya konektivitas antara sentra perikanan tangkap dan antar pulau serta antar provinsi masih sangat terbatas

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Minimnya sarana dan prasarana budidaya
- b. Kapasitas SDM (pembudidaya) masih rendah
- c. Penanganan pasca panen yang masih konvensional dan belum stabilnya harga
- d. Balai benih ikan/ udang di Poniang masih butuh dukungan operasional yang lebih baik
- e. Dibutuhkannya balai benih ikan air tawar yang dapat memberi dukungan ketersediaan benih air tawar bagi pembudidaya.
- f. Belum tersedianya pengelolaan perikanan budidaya yang berbasis kawasan dalam rangka optimalisasi produksi dan pemberdayaan masyarakat pembudidaya
- g. Masih minimnya minat investor dalam pengembangan usaha perikanan budidaya terutama untuk kegiatan Mariculture

3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP)

- a. Sarana dan prasarana penunjang pengolahan dan pemasaran yang masih terbatas;
- b. Masih rendahnya kualitas atau daya saing produksi
- c. Kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah

- d. Belum tersedianya depot dan sentra pengolahan produk perikanan
- e. Belum optimal implementasi dari pengembangan konektivitas *Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)* di Provinsi Sulawesi Barat
- f. Ketersediaan sistem rantai dingin (*cold storage* dan pabrik es) belum memadai
- g. Belum adanya produk yang tersertifikasi standar internasional
- h. Sistem pengolahan dan pengepakan produk masih sangat terbatas
- i. Minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah produk perikanan yang berdaya saing dan bernilai jual tinggi

4. Bidang PSDKP

- a. Masih lemahnya pengawasan terhadap *illegal fishing* dan *Destructive fishing*. Berbagai permasalahan diperairan Sulawesi Barat diwarnai oleh aktivitas penangkapan dengan penggunaan bahan peledak dan Bius (bahan kimia lainnya), penambangan pasir liar, penebangan hutan mangrove, pencemaran perairan, dan perburuan satwa laut yang dilindungi serta aspek pelanggaran tindak pidana perikanan baik dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan dari luar wilayah Sulawesi Barat;
- b. Terbatasnya sarana prasarana pengawasan, khususnya sarana dan prasarana Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan SDKP secara berkelanjutan
- d. Belum adanya penetapan kuota dalam mengeluarkan ijin kapal perikanan
- e. Minimnya tenaga profesional dalam pengawasan SDKP

- f. Minimnya lembaga pengawas kelautan dan perikanan baik yang formal maupun yang dibentuk oleh masyarakat
- g. Menurunnya daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas illegal fishing

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat dilakukan dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan, aspirasi yang muncul di stakeholder perikanan dan kelautan serta program dan kegiatan yang diusulkan dari kabupaten dan arahan Pimpinan terkait prioritas program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target yang perlu dicapai dalam satu tahun anggaran, serta jumlah pagu. Rancangan awal RKPD ini juga merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Rancangan awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat disajikan pada ***lampiran 2***, dan hasil review pada ***lampiran 3***.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat demikian pula dokumen ini juga mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tidak terakomodir dalam musrenbang tetapi dianggap sangat urgen untuk ditindaklanjuti sepanjang tidak bertentang dengan regulasi yang ada.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Barat, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat serta usulan dari seluruh stakeholders, masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan politik. Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan

Pemerintah Daerah dibidang kelautan dan perikanan, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat selalu diselaraskan dan disinergikan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Beberapa isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2026 yang direncanakan antara lain :

1. Pembangunan perikanan budidaya berbasis kawasan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang lebih modern dan upaya revitalisasi, pemutakhiran serta replacemant (penggantian) sarana prasarana yang sudah usang atau tidak layak pakai.
3. Optimalisasi dan pemberdayaan masyarakat di kepulauan serta masyarakat pesisir lainnya.
4. Penciptaan produk unggulan perikanan yang berdaya saing dan bernilai jual tinggi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir
5. Ciptakan iklim investasi usaha produksi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan
6. Operasional dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan (OPERASI GELAR TIM TERPADU DI LAUT)
7. Pengembangan kelompok ekonomi berbasis kerakyatan dan berbadan

usaha terutama dalam bentuk koperasi

8. Pemetaan dan Road Map Kemiskinan Nelayan Prov. Sulawesi Barat
9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
10. Pengembangan Budidaya Rumput Laut
11. Pengembangan integrasi budidaya rumput laut dengan perikanan tangkap
12. Pengembangan Sistem Logistik Ikan

Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan dan Masyarakat diurai sebagai berikut, dan disajikan pada **Tabel 2.3 dan 2.4.**

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten melalui Forum OPD Tahun 2025

Beberapa usulan kabupaten yang dibahas selama berlangsungnya kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang nantinya maksimal diakomodir 3 (tiga) kegiatan/Rincian Output sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Kab. Mamuju
 - a. Kapal 2,5 GT 3 Unit
 - b. Fishfinder 10 Unit
 - c. Mesin Dalam 33 PK 20 Unit
 - d. Mesin Dalam 24 PK 10 Unit
 - e. Mesin Katinting 5,5 PK 40 Unit
 - f. Mesin Dalam 26 PK 20 Unit
 - g. Mesin Dalam 26 PK 10 Unit
 - h. Mesin Katinting 9 PK 20 Unit
 - i. Mesin Katinting 5,5 PK 20 Unit
 - j. Rumpon dalam 30 Unit
 - k. Mesin Katinting 9 PK 50 Unit
2. Kab. Pasangkayu
 - a. Mesin Ketinting 9 PK 40 Unit
 - b. Gill Net (1,3") 200 Set
 - c. Gill Net (1,75") 500 Set
 - d. Rumpon 15 Unit

-
3. Kab. Majene
 - Pengadaan Mesin Dalam dan Mesin Katinting 100 Unit
 4. Kab Mamuju Tengah
 - a. Mesin Katinting 10 Unit
 - b. Kapal Penangkap ikan ukuran 3 Gt 1 Unit

- c. Jaring dan Pancing 10 set
- d. Alat bantu penangkap ikan 10 set
- 5. Kab. Polewali Mandar
 - a. Perbaiki Dermaga Pel. Lantora 1 Paket
 - b. Perbaiki Cool Storage Pel. Lantora 1 Paket
 - c. Pengadaan Mesin Katinting 5 Unit

B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- 1. Kab. Mamuju
 - a. Pengadaan Bioflok Unit 1 Paket
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumput Laut 1 Paket
 - c. Pengadaan Bibit & Pakan Ikan Lele 1 Paket
 - d. Pengadaan Bibit & Pakan Ikan Nila 1 Paket
 - e. Pembuatan Kolam Air Tawar 1 Paket
- 2. Kab. Pasangkayu
 - a. Pengadaan Benur Vannamei 2.500.000 Ekor
 - b. Pengadaan Pakan Udang 10.000 Kg
 - c. Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak (UPT Desa Bambakoro) 12.000 M³
 - d. Rehabilitasi Tambak Air Payau 6000 M³
 - e. Pengadaan Benih Nila 300.000 Ekor
 - f. Pengadaan Pakan Ikan 10.000 Kg
 - g. Percetakan Kolam Air Tawar 6000 M³
- 3. Kab. Majene
 - a. Revitalisasi Saluran Irigasi Tambak 100 Ha
 - b. Bibit Udang Vannamei 10.000.000 Ekor
- 4. Kab. Mamasa
 - a. Pengadaan Sarana Produksi (Pakan dan Bibit)

Bagi Kelompok Pembudidaya Ikan 12 Paket

- b. Pengadaan Induk Unggul Ikan Mas 150 ekor
 - c. Pengadaan Induk Unggul Ikan Nila 150 ekor
5. Kab. Mamuju Tengah

- a. Sarpras Budidaya Rumput Laut 1 Paket
 - b. Sarpras budidaya air payau 1 Paket
 - c. Bantuan pakan ikan dan udang 1 Paket
 - d. Mesin Pakan 1 Paket
 - e. Pupuk 250 Kg
 - f. Sarpras Budidaya ikan lele 1 Paket
6. Kab. Polewali Mandar
- a. Pengadaan Induk Unggul Nila 50 Ekor
 - b. Pengadaan Induk Unggul Lele 50 Ekor
 - c. Pengadaan Induk Unggul Mas 50 Ekor
 - d. Rehabilitasi BBAT Sepong 1 Paket

C. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Kab. Mamuju
 - a. Alat Olahan 4 Set
 - b. Motor Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan 2 Unit
 - c. Motor Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan Tiga Roda 2 Unit
2. Kab. Pasangkayu
 - a. Pengadaan Keranjang Ikan 50 Buah
 - b. Pengadaan Timbangan Ikan 50 Buah
 - c. Pengadaan Cold Box 100 L 50 Buah
 - d. Pengadaan Termos Ikan 38 L 100 Buah
 - e. Bedah UPI 1 Unit
 - f. Pengadaan Motor Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan 2 Unit
 - g. Sarpras Penjualan Ikan beserta Kelengkapannya 5 Unit
 - h. Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Amplang Ikan 1 Kali
3. Kab. Majene

Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran bagi kelompok
Pemasar di wilayah Kab. Majene 59 Poklahsar

4. Kab. Mamasa

- a. Pengadaan Sarana Pengolahan Ikan / Pengasapan Ikan 3 Paket
- b. Kegiatan Gerak Memasyarakatkan Ika (GEMARIKAN) 1 paket

5. Kab. Mamuju Tengah

- a. Mobil Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan 1 Unit
- b. Motor Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan 1 Unit
- c. Sarpras Pengolahan Hasil Perikanan 1 Set
- d. Cold Box 100 liter 10 Buah

6. Kab. Polewali Mandar

- a. Pelatihan Pengemasan Produk Olahan Perikanan 1 Kali
- b. Pengadaan Freezer 1 Unit
- c. Pengadaan Panci Presto 10 Kg 1 Unit
- d. Pengadaan Coolbox 100 L 10 Unit

D. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Kab.

- a. Pembangunan Pos Pengawasan 2 Paket.

Tabel 2.2 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.172.822.133
1	Pelaksanaan pengawasan di kawasan konservasi dalam mendukung efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Kep. Balabalakang	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000	Seluruh Kabupaten
2	Pemberian Asuransi bagi Nelayan Sulbar selama 12 Bulan	14000	Nelayan	16.000	2.688.000.000	Seluruh Kabupaten
3	Biaya operasional Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Barat	1	Tahun	150.000.000	150.000.000	Seluruh Kabupaten
4	Penyediaan instalasi listrik Pabrik Es Pelabuhan Perikanan Palipi	1	Paket	50.000.000	50.000.000	Kab. Majene
5	Penyediaan benih ikan nila	1130000	ekor	500	565.000.000	Seluruh Kabupaten
6	Penyediaan benur udang vaname	1000000	ekor	135	130.000.000	Seluruh Kabupaten
7	Penyediaan benih ikan bandeng	1000000	ekor	150	150.000.000	Seluruh Kabupaten
8	Kebun Bibit Rumput laut	2	Kab	87.500.000	175.000.000	Seluruh Kabupaten
9	Penyediaan Pakan Ikan	10000	Kg	18.900	189.000.000	Seluruh Kabupaten
10	Penyediaan Pupuk Urea	10000	Kg	10.000	100.000.000	Seluruh Kabupaten
11	Penyediaan Indukan ikan nila	3500	Ekor	60.000	210.000.000	Seluruh Kabupaten

1 2	Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Perpanjangan sertifikat dan sertifikasi yang baru.	1	Tahun	60.000.000	60.000.000	Seluruh Kabupaten
1 3	Fasilitasi perijinan usaha budidaya (sebanyak 50 Perizinan)	1	Tahun	50.000.000	50.000.000	Seluruh Kabupaten
1 4	Penyediaan sarana dan prasarana UPR Botteng	1	Paket	300.000.000	300.000.000	Kab. Mamuju
1 5	Perahu panen dan mesin budidaya rumput laut	5	Unit	15.000.000	63.552.310	Seluruh Kabupaten
1 6	Penyediaan Pakan larva Vannamae 30 juta nauplii	1	Paket	238.655.200	238.655.200	Kab. Majene
1 7	Penyediaan bahan dan peralatan produksi perbenihan	1	Paket	199.758.600	199.758.600	Kab. Majene
1 8	Penyediaan sumur bor air tawar/payau Kapasitas : 5m3/Jam	2	Unit	100.000.000	200.000.000	Kab. Majene
1 9	Penyediaan Pompa air air laut	3	Unit	30.300.000	90.900.000	Kab. Majene
2 0	Naupli F1 Vannamae	30	Bungkus	5.750.000	172.500.000	Kab. Majene
2 1	Pengadaan Calon Indukan ikan nila	500	Ekor	60.000	30.000.000	Kab. Majene

2 2	Penyediaan Bahan Bahan Kimia	1	Paket	76.916.023	76.916.023	Kab. Majene
2 3	Pakan Indukan Nila 1000 ekor selama satu tahun	7000	Kg	18.900	132.300.000	Kab. Majene
2 4	Pakan larva Nila 1 juta ekor target ukuran 5-7 cm selama 30 hari	4500	Kg	29.600	133.200.000	Kab. Majene
2 5	Pakan Pembesaran Ikan Nila Target 3 Ton FCR 1,2 selama 1 kali siklus	3600	Kg	18.900	68.040.000	Kab. Majene
2 6	Pembangunan Pos Pokmaswas di Kepulauan Balabalakang	1	Paket	200.000.000	200.000.000	Kab. Mamuju
2 7	Gemarikan (Gemar Makan Ikan)	2	Paket	100.000.000	100.000.000	Seluruh Kabupaten

Tabel 2.3 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN	OPD TUJUAN	VOLUME	SATUAN	USULAN ANGGARAN
1	Rumpon	Tidak punya rumpon, hasil tangkapan terbatas	Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	kelompok	100.000.000
2	Mesin Katinting K3 13 PK	Kekurangan peralatan alat tangkap nelayan	Kelompok Harapan Sejati, Desa Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	Unit	18.000.000
3	Mesin Katinting K3 13 PK	Kendala Melaut tidak punya mesin katinting	Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	145.000.000
4	Mesin Katinting K3 13 PK	Susah melaut, tidak punya mesin katinting	Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	78.000.000
5	Mesin Katinting K3 13 PK	Susah melaut, tidak punya mesin katinting	Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	130.000.000
6	Mesin Katinting K3 13 PK	Susah melaut, tidak punya mesin katinting	Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	75.000.000
7	Rumpon	Kurangnya sarana tangkap Nelayan	Kelompok PAMMASE PUANG Desa Karama kecamatan Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000
8	Rumpon	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	Kelompok NURHAYATI Desa Karama Kecamatan Tinambung , Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000
9	Rumpon	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	Kelompok ANUGRAH Kecamatan Tinambung , Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000
10	Rumpon	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	Kelompok MUTIARA LAUT Desa Karama Kecamatan Tinambung	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000

11	Rumpon	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	, Provinsi Sulawesi Barat Kelompok PAMMMASE INDAH Desa Karama Kecamatan Tinambung , Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	150.000.000
12	Mesin Katinting K3 9 PK	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	Kelompok ASSAMI Desa Karama Kecamatan Tinambung , Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	-
13	Mesin Katinting K3 9 PK	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	Kelompok Mutiara Laut Desa Karama Kecamatan Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000
14	Rumpon	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	Kelompok Laut Mulia Desa Karama Kecamatan Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000
15	Rumpon	Kurangnya Fasilitas Tangkap Nelayan	Kelompok Wahyu Ilahi Desa Karama Kecamatan Tinambung , Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000
16	Rumpon	Permohonan Bantuan pengadaan Rompon / alat penangkap ikan Klp "Bintang Laut "desa karama Tinambung	Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab.polman, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	paket	100.000.000
17	Pengadaan Kapal 20 GT	Kelompok Halal kekurangan alat tangkap ikan	Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	1.100.000.000
18	Mesin Katinting K3 9 PK	Tidak adanya mesin pendukung untuk meningkatkan pendapatan hasil tangkap nelayan	KN. Luluare, Dusun Kampung Rea, Desa Beru- beru, Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Unit	26.000.000
19	Mesin Katinting K3 13 PK	TIDAK ADANYA MESIN KATINTING HONDA 13 PK. BINTANG UTARA	Kel. PASANGKAYU Kec. PASANGKAYU , Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	paket	150.000.000
20	Rumpon	Tidak adanya rumpon. BATANG RAPPE DUA	Kel. pasangkayu Kec. pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	paket	150.000.000
21	Alat Tangkap Jaring/Pukat 1"3/4	Kondisi alat tangkap saat ini mulai rusak	Desa Kambunong Kecamatan Karossa, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	50.000.000
22	Kendaraan Roda Tiga	permohonan bantuan alat transportasi tiga roda (viar) Kelompok tani " IDOLA" Desa tangan baru kec. limboro kab. polman	Desa tangan baru kec. limboro kab. polman, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	unit	45.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI BARAT** | **2026**

23	Pengadaan Kapal 30 GT	Peningkatan kapasitas alat tangkap ikan	Kelurahan Takatidung, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	1.500.000.000
24	Purse Seine Panjang 351-450 Meter	Peningkatan kapasitas alat tangkap ikan	Kelurahan Takatidung, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	300.000.000
25	Pengadaan Kapal 15 GT	Kelompok nelayan belum memiliki kapal untuk melaut ke laut lepas	KN. AL FADIL 227, Kasiwa Tengah, Kec. Mamuju., Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	900.000.000
26	Rumpon	Permohonan rumpon untuk usaha pengembangan perikanan Klp "BAITUL MAQDIS" Dideda sabang subik	Desa Sabang subik kec. Balanipa Kab Polman, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	paket	100.000.000
27	Mesin Katinting K3 13 PK	Tidak tersedianya alat tangkap yang memadai	Lingk. Alinduang Kel. Palipi soreang Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat	Majene	Dinas Kelautan dan Perikanan	30	Unit	130.000.000
28	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	Meningkatkan Hasil Pemasaran	Desa Toabao, Kec. Papalang, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	Unit	28.000.000
29	Alat Tangkap Jaring/Pukat 3"	Tidak tersedianya alat tangkap yang memadai	Totolisi utara kel. Totolisi sendana kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat	Majene	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	Unit	55.000.000
30	Mesin Katinting K3 13 PK	permohonan bantuan mesin katinting dan alat tangkap KLP BERKAH ILAHI" Balanipa	Kecamatan Balanipa kab. polman, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	klp	100.000.000
31	Purse Seine Panjang 251-350 Meter	Nelayan Kekurangan sarana tangkap ikan untuk "Kelompok samusenga'na"	Binanga, Kec. mamuju, Kab. mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	200.000.000
32	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	Nelayan Kekurangan sarana pemasar perikanan untuk "Kelompok harapan baru"	bonehau, Kec. bonehau, Kab. mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	28.000.000
33	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	Nelayan Kekurangan sarana pemasar perikanan untuk "Kelompok tunas inti"	belang-belang, Kec. kalukku, Kab. mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	28.000.000
34	Purse Seine Panjang 250 Meter	Kurangnya alat tangkap Nelayan	Kasiwa Tengah, Kel. Binanga. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	200.000.000
35	Mesin Katinting K3 13 PK	perlunya peremajaan Mesin kapal penunjang Sarana penangkapan ikan	Desa tumbu, kec. topoyo, kab. mamuju tengah, Provinsi	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	klp	130.000.000

36	Mesin Katinting K3 13 PK	butuh Bantuan Mesin katin- ting Tidak Punya Mesin Katinting untuk melaut	Sulawesi Barat Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	130.000.000
37	Rumpon	Fasilitas Tangkap tidak memadai	kelompok Assami, Desa Karama, Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	30.000.000
38	Mesin Katinting K3 13 PK	untuk mempermuda nelayan mencari ikan dan meningkatkan perekonomian	desa galeso kec. wonomulyo kab. polewali mandar prov. sulawesi barat , Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	unit	130.000.000
39	Mesin Katinting K3 13 PK	Butuh dukungan mesin kelompok nelayan Seroja	Dusun Rea Kontara I Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	Unit	100.000.000
40	Mesin Tempel 40 PK	Kelompok nelayan kekurangan alat tangkap	KN. Kancing Pool, Desa Lebani, Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	65.000.000
41	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	MAsyarakat belum memiliki kendaraan untuk membawa hasil tangkap	KN. Sinar Lestari, Dusun Tamala, Desa Lebani, Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	25.000.000
42	Mesin Dalam (Pakai Tangki) 30 PK	Masyarakat tidak memiliki alat tangkap yang besar	KN. Kakap Merah, Desa Dungkait, Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	18.000.000
43	Mesin Katinting K3 13 PK	Kelompok nelayan belum memiliki mesin katinting	KN. Cahaya Masagena, Desa Dungkait, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Unit	30.000.000
44	Mesin Katinting K3 13 PK	Pengadaan Mesin Perahu Katinting	Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	unit	120.000.000
45	Rumpon	Permohonan bantuan rumpon KELOMPOK "MARENDENG"	Desa Babana, Kec. Budong-budong, Kab. mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	KLP	250.000.000
46	Rumpon	Permohonan bantuan Rumpon "KELOMPOK LAUT BIRU"	Kel/desa lamba-lamba, kec. pangale, kab. mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	KLP	250.000.000
47	Rumpon	Permohonan bantuan rumpon "KELOMPOK AA PATUJU"	Kel/desa Budong-budong/patulana kec topoyo kab. mamuju tengah, Provinsi	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	KLP	250.000.000

			Sulawesi Barat					
48	Rumpon	permohonan bantuan rumpon kelompok nelayan " DUTA TANI NELAYAN"	kel/desa kombiling, kec. Pangale, kab. Mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Klp	250.000.000
49	Mesin Katinting K3 13 PK	permohonan bantuan mesin katinting "kelompok INSAN LAUT"	Kel/desa kambunong, kec. Karossa, Kab. Mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	UNIT	120.000.000
50	Mesin Katinting K3 13 PK	Permohonan bantuan mesin katinting KELOMPOK PARAPPA"	Kel/desa kombiling kec. pangale, kab. mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	UNIT	120.000.000
51	Alat Tangkap Jaring/Pukat 3"	permohonanan sarana perikanan	desa tumbu, kec topoyo, kab. mamaju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	paket	70.000.000
52	Alat Tangkap Jaring/Pukat 1"3/4	Kurangnya Alat Tangkap Ikan Di Akibatkan Karna Jaring Rusak	Kelurahan Binanga,Kecamatan mamuju , Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	75.000.000
53	Rumpon	Kurangnya Rumah Untuk Menampung Ikan Di Laut Dalam	Lingkungan Kasiwa Timur,Kelurahan Binanga,Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	125.000.000
54	Mesin Katinting K3 13 PK	permohonan bantuan mesin katinting kelompokm CAHAYA LAUT	Kel/desa babana, kec. budong-budong kab. mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	unit	50.000.000
55	Rumpon	permohonan bantuan rumpon ikan	Desa Tumbu kec topoyo kab. mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	250.000.000
56	Alat Tangkap Jaring/Pukat 3"	permohonan keramba ikan	desa kambunong, kec. karossa kab mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	klp	60.000.000
57	Rumpon	permohonan bantuan rumpon ikan	desa lumu kec. budong-budong, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	unit	120.000.000
58	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	Mempermudah usaha	Desa Bunde, Kec.Sampaga, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	28.000.000
59	Mesin Katinting K3 13 PK	peningkatan sarpras usaha	KELOMPOK TUNAS MEKAR DUSUN KEMPUNG TENGAH	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	70.000.000

			KELURAHAN PASANGKAYU KECAMATAN PASANGKAYU , Provinsi Sulawesi Barat					
60	Mesin Katinting K3 9 PK	Belum memiliki alat tangkap yang memadai	KN. Maleo, Dusun Tinaungan, Desa Labuang Rano, Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	Unit	26.000.000
61	Mesin Dalam (Pakai Tangki) 30 PK	Kelompok nelayan belum memiliki alat tangkap yang memadai	KN. Bering Bone, Dusun Lebani Utara, Desa Lebani, Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	36.000.000
62	Mesin Katinting K3 9 PK	Belum memiliki alat tangkap menggunakan mesin	KN. Al Bassam, Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Unit	26.000.000
63	Mesin Dalam (Pakai Tangki) 30 PK	Kelompok Nelayan belum memiliki mesin kapal yang besar	KN. Sinar Salanase, Desa Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	18.000.000
64	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	Kesulitan membawa hasil tangkap untuk dipasarkan	KN. Rappa Bombang, Link. Ampallas Utara, Kel. Bebang, Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	25.000.000
65	Alat Tangkap Jaring/Pukat 1"3/4	Kekurangan alat tangkap untuk melaut	KN. Tara Tajo, Dusun Tapalang, Desa Tampilang, Kec. Tapalang, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Paket	10.000.000
66	Mesin Katinting K3 9 PK	kebutuhan nelayan	lingkungan landi, kecamatan simboro, kabupaten mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	unit	-
67	Mesin Katinting K3 13 PK	Kondisi mesin rusak, Butuh Mesin baru	Desa Pangiang kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	Unit	50.000.000
68	Rumpon	kebutuhan nelayan	kelurahan rangas, kecamatan simboro, kabupaten mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	unit	-
69	Mesin Katinting K3 13 PK	Pengadaan Mesin Perahu Katinting	Dusun Kampung Tengah, Kel. Pasangkayu, kec. pasangkayu, kab. pasangkayu , Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	unit	120.000.000
70	Mesin Katinting K3 13 PK	Pengadaan Mesin Perahu Katinting	Dusun Tura, Desa Karya Bersama, kec.	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	unit	120.000.000

			Pasangkayu, kab.Pasangkayu , Provinsi Sulawesi Barat					
71	Rumpon	Klp. PELAUT MANDAR Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Desa Sabang Subik, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	100.000.000
72	Rumpon	Klp. POSASI ULUNG Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Klp. POSASI ULUNG, Desa Sabang Subik, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	100.000.000
73	Purse Seine Panjang 251-350 Meter	Klp. RESKIANA Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Desa Sabang Subik, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	250.000.000
74	Purse Seine Panjang 251-350 Meter	Klp. CAHAYA IBADAH Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Klp. CAHAYA IBADAH, Desa Sabang Subik, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	100.000.000
75	Purse Seine Panjang 251-350 Meter	Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Klp. MASLINA, Desa Sabang Subik, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	250.000.000
76	Mesin Dalam 295	Klp. REZKI LAUT Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Desa Pambusuang, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	100.000.000
77	Alat Tangkap Gill Net	Klp. BERKAH Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Lingk. Gaspol, Kel. Polewali, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	50.000.000
78	Alat Tangkap Gill Net	Klp. SIROLAI Kekurangan Sarana dan prasarana tangkap ikan	Kel. Polewali, Kab. Polman Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	50.000.000
79	Rumpon	permohonan Pengadaan Rumpon	kel. pasangayu, kec. pasangayu, kab.pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	-
80	Rumpon	permohonan Pengadaan Rumpon bagi nelayan	Desa Letawa, kec.Sarjokab.Pasangkayu , Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	90.000.000
81	Rumpon	Dibutuhkan alat bantu penangkapan ikan "pengadaan Rumpon"	KABUPATEN MAJENE, Provinsi Sulawesi Barat	Majene	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	UNIT	160.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI BARAT** | **2026**

82	Mesin Katinting K3 9 PK	Bantuan Mesin Katinting	Ling.Bulutakang Kel. Rangas Kec simboro, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	unit	120.000.000
83	Pengadaan Kapal 15 GT	Dibutuhkan kapal Nelayan	Desa Taan Kec Tapalang , Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	unit	800.000.000
84	Mesin Katinting K3 9 PK	para nelayan dan petani membutuhkan bantuan fasilitas transport alat katinting	kecamatan topoyo, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	50	unit	120.000.000
85	Alat Tangkap Jaring/Pukat 1 ³ / ₄	nelayan membutuhkan alat tangkap untuk menunjang perekonomian bagi kelompok tani buah harapan	dusun Bajoe Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	buah	50.000.000
86	Mesin Katinting K3 13 PK	tidak adanya alat transportasi menangkap ikan	Desa Kambunong, Kec. Karossa, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	25	Unit	120.000.000
87	Mesin Katinting K3 9 PK	Kelompok nelayan masih belum memiliki mesin untuk mendukung produktivitas.	Kelompok Tuna Karema, Jalan Nelayan II, Karema Selatan., Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Unit	26.000.000
88	GPS Etrex 30x	Nelayan kekurangan sarana tangkap ikan	Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	20	Buah	50.000.000
89	Pengadaan Kapal 7 GT	Nelayan Butuh Sarana Penangkapan ikan	Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	200.000.000
90	Mesin Katinting K3 13 PK	BANTUAN MESIN KATINTING KELOMPOK NELAYAN	DESA DAPURANG KEC DAPURANG KAB PASANGKAYU, Provinsi Sulawesi Barat	Pasangkayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	Kelompok	120.000.000
91	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	Belum ada kendaraan untuk mengakses pasar untuk menjual hasil tangkap	Kelompok Kacci-kacci, Dusun Tapalang, Desa Tampalang, Kec. Tapalang, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	25.000.000
92	Mesin Katinting K3 13 PK	Butuh Bantuan Mesin Katinting 300 PK	Kelompok Nelayan Laut Babanglambang ,Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa , Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok	150.000.000
93	Kendaraan Roda Dua Tanpa	kebutuhan masyarakat	kabupaten mamuju, provinsi	Mamuju	Dinas Kelautan dan	2	unit	-

	Gandengan		sulawesi barat, Provinsi Sulawesi Barat		Perikanan			
94	Mesin Katinting K3 9 PK	Kelompok nelayan belum memiliki mesin katinting untuk melaut jauh	KN. Karamba Sunu, Kel. Rangas., Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Unit	26.000.000
95	Kendaraan Roda Dua (Gandengan)	Dibutuhkan kendaraan untuk penjualan hasil ikan	Kelompok pemuda pasar kelurahan binanga kec mamuju kab mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	28.000.000
96	Rumpon	Masih banyak nelayan yang belum memiliki	kecamatan topoyo, Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	unit	200.000.000
97	Mesin Katinting K3 13 PK	Butuh bantuan sarana perikanan Mesin katinting Kelompok BARU BIAR	Kel. mosso Dusun labuang Kec. sendana, Kab. majene, Provinsi Sulawesi Barat	Majene	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	UNIT	100.000.000
								12.778.000.000

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten melalui Desk Kewilayahan Tahun 2026

No.	Uraian Usulan	Output / Volume Usulan	Program	Kegiatan	Lokasi
1	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	30 Kelompok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Katinting dan atau Mesin Dalam	Kabupaten Majene

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam rangka melaksanakan pembangunan disegala bidang. Oleh karenanya kebijakan ini harus mengacu pada kondisi kekinian masyarakat dalam rangka mengemban amanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan oleh daerah harus mengacu pada strategi pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

1. Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi:

Sub Agenda: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan

- a. Meningkatkan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan;
- b. Peningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir;
- c. Peningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya;

-
- e. meningkatkan SDM, riset kemaritiman dan kelautan serta perbaikan sistem database kelautan dan perikanan; dan
 - f. Menyusun pedoman penyelerasan RZWP3K dan RTRW Provinsi.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi:

Sub Agenda: Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

- a. meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
- b. meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- c. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
- d. meningkatkan penciptaan peluang usaha
- e. meningkatkan nilai tambah usaha sosial.; dan

Arah kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merupakan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, prioritas dan strategi pembangunan daerah dan dijabarkan dalam visi misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut maka arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat ditujukan pada revitalisasi usaha kelautan dan perikanan yang meliputi kebijakan :

1. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas masyarakat kelautan dan perikanan
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan usaha bidang perikanan dengan memperhatikan komoditas unggulan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
3. Peningkatan dan pengendalian pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan
5. Identifikasi potensi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan

daerah melalui usaha-usaha produktif.

6. Penyediaan sarana dan prasarana sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan
7. Memacu ketersediaan *engine prosperity* (mesin kesejahteraan) disektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kehadiran teknologi serta menciptakan inovasi baru.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat serta dapat dirumuskan ke dalam program dan kegiatan.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan dan sesuai dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pembangunan tahun 2026 yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Sulawesi Barat secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan.

Adapun sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan
4. Tersedianya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil Sulawesi Barat

5. Tersedianya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif
6. Terwujudnya Birokrasi DKP yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2026, menyesuaikan antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan yang diusulkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 adalah 6 program, 27 Kegiatan dan 82 Sub Kegiatan
- b. Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 sebesar Rp.37.726.006.823 (Tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun rincian Rancangan Akhir RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 disajikan pada ***lampiran 4***, dan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 disajikan pada ***lampiran 5***.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjabaran strategi dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026, yang dimanifestasikan dalam rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan

program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dirumuskan secara komprehensif untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD. Arah dan kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Barat,

merupakan kebijakan yang berkaitan dengan prioritas dan strategi pembangunan daerah dan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dinas kelautan dan perikanan kabupaten. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan strategis dan arah kebijakan diatas dirumuskan kebijakan komprehensif sebagai berikut :

a. Konsentrasi pada peningkatan produksi Tuna dan kelestarian komoditas ikan lokal (ikan terbang, cakalang, layang dll) dengan memperhatikan aspek ekologis.

1. Kabupate Mamuju Tengah :

- Pembangunan Pabrik ES (Sistem Rantai Dingin)
- Pembangunan/rehabilitasi UPI ber-SKP
- Pengadaan alat tangkap (Pancing) Tuna
- Pengadaan Kapal Panangkap Tuna (Ukuran 1 GT)
- Penerapan inovasi Pamekang (Pemanfaatan Media Informasi Penangkapan Ikan)
- Pengadaan mobil berpendingin

2. Kabupaten Majene

- Sosialisasi pemetaan wilayah penangkapan ikan
- Pengadaan alat tangkap (Pancing) Tuna
- Pengadaan kapal pemancing Tuna (Ukuran >5 GT)

b. Peningkatan ekonomi pesisir melalui integrasi tambak udang, silvo-fisleri kepiting bakau dan karamba jaring apung ikan demersal yang ditopang pasokan energi bayu dan sinar matahari sepanjang pesisir Sulawesi Barat.

1) Tambak Udang

- a) Dusun Bajoe, Desa Rea Timur Kec. Binuang Kabupaten Polman.
- b) Dusun Tanjung China Desa Bambakoro Kec. Lariang Kab.

Pasangkayu

- c) Desa Lamba-lamba Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
- d) Lingkungan Barane Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab.

Majene

- e) Kec. Papalang Kab. Mamuju

- 2) Silvo Fishery
 - a) Dusun Mampie desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman
 - b) Dusun Salule Desa Pangeang Kec. Bambalamuto Kab. Pasangkayu
 - c) Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene
 - d) Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
 - e) Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
 - 3) Keramba Jaring Apung (KJA) dengan perpaduan alat tangkap serok untuk komoditas ikan demersal.
 - a) Dusun Mirring Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman
 - b) Dusun Bone Manjeng Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
 - c) Dusun Taraweki Desa Tubo Kec. Tubo kab. Majene
 - d) Dusun Pulau Kambunong Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
 - e) Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
 - f) Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
 - 4) Restoking ikan air Tawar desa Tondok Bakarua Kec. Mamasa Kab. Mamasa
 - 5) Budidaya rumput laut menggunakan teknologi rakit dengan pemekaran jaring tasi dan jaring gillnet.
 - a) Dusun Pulau Kambunong Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
 - b) Desa Belang-belang Kec. Papalang Kab. Mamuju
 - c) Desa Kabuloang, Sinyonyoi, Bebanga Kec. Kalukku
- c. Membangun kampung nelayan komoditas unggulan lokal sidat di (Kab. Pasangkayu), KJA Kerapu (kab. Mamuju), ikan terbang dan garam (kab.

Majene), ikan air tawar (nila, mas dan mujaer dll) melalui penguatan Sentra Benih Sulbar di BBI Tamalantik, Kepiting Rajungan (Kab. Mamuju Tengah) dan Lele (Kab. Polman)

d. Membangun wisata bahari di 5 Kabupaten pesisir.

- Wisata religi di Pulau Salama Kabupaten Polewali Mandar

- Wisata bahari Sarjo di Kabupaten Pasangkayu
 - Wisata bahari Rumput Laut di Pulau Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah
 - Wisata bahari Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju
 - Wisata Bahari Taraujung Sendana Kabupaten Majene
- e. Penguatan infrastruktur pelabuhan
- f. Membangun Marine Techno Park di Tanjung Ngalo, Kab. Mamuju Pembangunan Kepulauan Bala-balakang

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 6 program 27 Kegiatan dan 82 Sub Kegiatan pada tahun 2026 dengan penjelasan 1 program bersifat rutin dan 5 program bersifat mendukung langsung pencapaian sasaran RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dan RPD Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023-2026. Secara lebih detail rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan dalam ***lampiran 6***.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dilingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 mengacu kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari kabupaten, pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan usulan masyarakat. Renja DKP tahun 2026 ini berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2026 yang bertemakan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 ini secara konsisten memuat agenda rencana pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang mengarah kepada dukungan pencapaian RPD dan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2026. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu

diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kelautan dan perikanan yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Oleh karena itu, agar dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat di tahun-tahun mendatang, maka peran serta maksimal dari seluruh ASN dan stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Diharapkan rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait demi tercapainya tujuan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini dan tentu saja segala saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak dengan lapang dada diucapkan banyak terima kasih.

Mamuju, Juni 2025

Kepala Dinas,



Dr. Suyuti Marzuki, S.Pi, MT, M.sc
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19690820 199903 1 005

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						37.726.006.823,00							35.727.200.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						37.726.006.823,00							35.727.200.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						37.726.006.823,00							35.727.200.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.509.022.313,00						-	12.150.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4,30 80	2,50 3,70 68,79 97,62	100 2,60 3,80 70	100 2,70 3,90 72	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	265.000.000,00						-	570.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Polewali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0,00	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	80	97,62	70	72									
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.239.930.020,00			-	-	-	-	8.090.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/Bulan	7.154.930.020,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	151.100.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				110 Paket	80.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	10.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				2 Dokumen	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4,30 80	2,50 3,70 68,79 97,62	100 2,60 3,80 70	100 2,70 3,90 72	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	705.218.600,00			-	-	-	-	555.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	93.210.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	469.338.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	102.670.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	242.529.925,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	221.225,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	36.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	114.390.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4,30 80	2,50 3,70 68,79 97,62	100 2,60 3,80 70	100 2,70 3,90 72	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	91.118.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	517.767.768,00			-	-	-	-	640.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	39.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	86.183.768,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	79.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	312.784.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.476.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	327.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	276.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.509.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	20.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-			-	18.114.902.910,00						-	3.333.000.000,00	
		[Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan]	Persentase luas ekosistem mangrove yang terjaga dan dipulihkan dibandingkan dengan target Persentase Luas tutupan terumbu karang dalam kondisi baik dan sangat baik	40,51 54,94	30 47,41	31,5 47,88	33,08 48,84	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.675.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				240.067,16 Ha	0,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				100 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan]	Persentase luas ekosistem mangrove yang terjaga dan dipulihkan dibandingkan dengan target Persentase Luas tutupan terumbu karang dalam kondisi baik dan sangat baik	40,51 54,94	30 47,41	31,5 47,88	33,08 48,84	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</i>				150 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir														
			<i>Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia														
			<i>Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi</i>				1 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru														
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru</i>				10 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan														
			<i>Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan</i>				1 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan]	Persentase luas ekosistem mangrove yang terjaga dan dipulihkan dibandingkan dengan target Persentase Luas tutupan terumbu karang dalam kondisi baik dan sangat baik	40,51 54,94	30 47,41	31,5 47,88	33,08 48,84	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha														
			Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-			-	18.114.902.910,00			-	-	-	-	438.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 Orang	578.552.310,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				10 Kelompok	16.918.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		127.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100 Orang	130.006.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		64.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				9 Kelompok	488.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		107.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	334.086.400,00						-	9.311.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan produksi perikanan tangkap]	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	1,69	0,88	0,97	1,06	334.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	3.845.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.540.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	0,00			-	-	-	-	598.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		523.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	315.196.400,00			-	-	-	-	4.316.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</i>				1 Pelabuhan Perikanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia</i>				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				2 Layanan	265.196.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	334.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-
	3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	0,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				15 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	197.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		197.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	1,69	0,88	0,97	1,06	334.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	18.890.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	18.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	334.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	4.455.347.200,00						-	5.340.200.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	210.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				5 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko</i>				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	219.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		219.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	3,37	1,68	1,68	2,03	4.455.347.200,00	-	-	-	-	-	-	5.340.200.000,00	-
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	3.810.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				6 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	4.455.347.200,00	-	-	-	-	-	-	5.340.200.000,00	-
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.540.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pembudidaya</i>				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia</i>				10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan produksi perikanan budidaya]	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	3,37	1,68	1,68	2,03	4.455.347.200,00	-	-	-	-	-	-	5.340.200.000,00	-
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	4.355.347.200,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	2.814.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	1.541.347.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	167.648.000,00						-	1.821.000.000,00	
		[Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	100	100	100	100	167.648.000,00	-	-	-	-	-	-	1.821.000.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			-	166.842.000,00			-	-	-	-	1.725.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	1.341.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		620.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				8 Kelompok Masyarakat	24.500.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	167.648.000,00	-	-	-	-	-	-	1.821.000.000,00	-
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	806.000,00			-	-	-	-	96.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				12 Pelaku Usaha	806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	5.145.000.000,00						-	3.772.000.000,00	
		[Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat]	Persentase konsumsi ikan	2,43	0,88	0,97	1,11	5.145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.772.000.000,00	-
			Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	2,52	1,02	1,12	1,29									
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	357.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri														
			<i>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>				5 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			-	0,00			-	-	-	-	455.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>				17 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		276.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			<i>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				10 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	5.145.000.000,00			-	-	-	-	2.960.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi</i>				20 Unit Usaha	5.045.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
J U M L A H								37.726.006.823,00							35.727.200.000,00	